

MARJINALISASI JOKOWI TERKAIT PENCAPRESAN DIRINYA YANG DIBENTUK OLEH SITUS BERITA ONLINE *SINDONEWS.COM*

Brahma Putra Pratama

Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Indonesia, Jakarta

E-mail: brahmaputrapratama@yahoo.com

Abstract

General election is a realization of democratic process in Indonesia. On its process, there is a declaration of a candidate of president that becomes the focus of interest of certain media. The media that should be able to deliver the news in unbiased way is used by the media owner to get his/her political opponent down through some news that can be categorized as negative campaign. Representation of Jokowi, the candidate of the president promoted by Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P), was framed by the media and through its negative coverage it makes him marginalized. It happened because of the influence of the news making process in the editorial room that was affected by the interest of the media owner. This research observed four news articles from four different authors in the online news website *sindonews.com*. Methodological approach that was applied in the research was Norman Fairclough's critical discourse analysis (CDA). As a research with critical paradigm, economy politic theory by Golding and Murdock was used to analyze. There were two stages of analysis: (1) stage of description of the script/text that showed the content and the descriptive analysis of the text and does not correlate with other aspects and (2) stage of explanation that was used to correlate the description explained with its related context. Primary data collection technic was text analysis and supported by secondary data from library study about news making process.

Abstrak

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan perwujudan proses demokrasi di Indonesia. Dalam prosesnya, terdapat pendeklarasian calon presiden dari partai tertentu yang dapat menjadi focus of interest dari media tertentu. Media yang seharusnya dapat menyampaikan berita secara objektif, digunakan oleh pemilik media untuk menjatuhkan lawan politik dengan membuat berita yang dapat dikategorikan sebagai negative campaign. Representasi Jokowi, calon presiden yang diusung dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dibentuk oleh media dan melalui pemberitaan negatifnya membuat Jokowi termarginalkan. Hal ini terjadi tidak terlepas dari adanya proses pembuatan berita oleh redaksi yang dipengaruhi oleh kepentingan pemilik media. Penelitian ini mengamati empat artikel berita dari empat penulis yang berbeda di situs berita online *sindonews.com* dengan menerapkan pendekatan metode analisis wacana kritis (Critical Discourse Analysis) Norman Fairclough. Sebagai penelitian yang berparadigma kritis, teori ekonomi politik Golding and Murdock digunakan untuk menganalisis. Ada dua tahap analisis: (1) tahap deskripsi naskah/teks yang menguraikan isi dan analisis teks secara deskriptif dan tidak dihubungkan dengan aspek lain dan (2) tahap eksplanasi yang digunakan untuk menghubungkan deskripsi yang dijabarkan dengan konteks yang menyertainya. Teknik pengumpulan data primer berupa analisis naskah dan didukung data sekunder dari studi pustaka tentang proses pembuatan berita.

Keywords: Jokowi, marginalization, framing, critical discourse analysis, sindonews.com

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2014 merupakan saatnya rakyat Indonesia merayakan pesta demokrasi. Pesta demokrasi yang dimaksud adalah pemilihan umum. Menurut UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemilu adalah suatu proses di mana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Diadakannya pemilihan umum (pemilu) ini merupakan sebagai wujud penerapan sistem demokrasi yang diterapkan oleh negara Republik Indonesia. Pemilu pertama dilangsungkan pada tahun 1955 dan bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante. Pada saat itu Lima besar dalam Pemilu ini adalah Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia.

Pemilu pada tahun 2014 diadakan dalam dua periode. Periode pertama dilakukan untuk pemilihan anggota legislatif pada tanggal 9 April dan periode kedua untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 9 Juli. Pada tahun 2014 tercatat ada 12 partai politik peserta pemilu, yaitu Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golongan Karya (Partai Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Sementara ini, ada beberapa kandidat calon presiden (capres) dan atau calon wakil presiden (cawapres). Partai Gerindra mengusung Prabowo Subianto sebagai capres. Partai Hanura mengusung Wiranto sebagai capres dan Hari Tanoe sebagai cawapres. Yang paling fenomenal adalah keputusan Partai PDIP untuk mengusung Jokowi sebagai calon presiden. Jokowi mendeklarasikan dirinya sebagai capres dari Partai PDIP pada tanggal 14 Maret 2014. Pemberitaan tentang capres dan cawapres ini sering muncul dalam beberapa media dan menjadi ajang untuk menunjukkan identitas mereka. Berita tentang pemilihan umum secara rutin menekankan aspek perlombaan dari kontes politik (Nabi dan Oliver, 2009: 114).¹

Pencapresan Jokowi ini menjadi berita yang besar di Indonesia selama beberapa minggu. Terkait pencalonnya sebagai capres, ada media yang memberitakan sebagai hal yang positif dan ada pula yang yang memberitakan sebagai hal yang negatif. Hal-hal positif tentang pemberitaan Jokowi dapat berupa kinerjanya yang baik dan jujur serta nilai-nilai kesederhanaan yang dimilikinya, sedangkan pemberitaan yang negatif dapat berupa sikap Jokowi yang tidak bertanggung jawab karena

¹Nabi, Robin L dan Mary Beth Oliver. (2009) *The SAGE Handbook of Media Processes and Effect*. California: SAGE Publications, Inc.

mencalonkan dirinya sebagai presiden di saat dia masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan masa pemerintahannya baru berjalan hampir 2 tahun.

Salah satu media yang memberitakan hal-hal yang negatif tentang Jokowi terkait pencapresannya adalah sindonews.com. Dalam berita yang dimuat dalam sindonews.com mengandung unsur-unsur *negative campaign*. Denny JA, Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (LSI), dalam penjelasannya membedakan antara *negative campaign* dan *black campaign*.² Menurutnya, dalam 'negative campaign' terdapat fakta-fakta, sedangkan 'black campaign' itu bukan berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Denny menyontohkan, bentuk 'negative campaign' itu antara lain yakni isu janji Jokowi untuk memimpin DKI Jakarta selama lima tahun. Kemudian, kasus dugaan korupsi pengadaan bus TransJakarta yang terjadi di masa kepemimpinan Jokowi.

Dalam sindonews.com terdapat beberapa artikel yang berupa *negative campaign* terhadap pencapresan Jokowi.

No.	Judul artikel	Penulis	Tanggal
1	Nyapres, Jokowi tak cukup modal populer	Haris Kurniawan	14 Maret 2014
2	Jokowi nyapres, pembangunan Jakarta berpotensi terhambat	Adam Prawira	15 Maret 2014
3	Jokowi dinilai tak bertanggung jawab	Mihardi	16 Maret 2014
4	HMI: Jokowi tak amanah dan berkhianat	Slamet Riadi	18 Maret 2014

Sindonews.com sebagai ranah publik dapat menjadi saluran distribusi berita (teks) di mana ada kekuasaan dalam mengendalikan produksi berita tersebut. Triyono dalam jurnalnya³ menyebutkan bahwa ahli demokrasi mengkhawatirkan keadaan di mana media yang seharusnya berfungsi sebagai public sphere, kemudian kepemilikannya dikuasai oleh segelintir pihak swasta. Implikasi yang muncul adalah para pemilik media tersebut akan menggunakan hak mereka untuk melakukan kontrol atas aliran informasi. Pada tahap selanjutnya, yang dikhawatirkan adalah terjadinya ketidakseimbangan dalam politik dimana mereka tidak sungkan-sungkan akan memberi dukungan kepada siapa saja yang mendukung visi misi mereka dan mencemarkan siapapun yang tidak sependapat dengan mereka. Dengan demikian, konglomerasi komunikasi (media) menjadi elemen baru dalam ranah penyalahgunaan kekuasaan.

Saat ini sindonews.com merupakan bagian dari MNC Group yang dimiliki oleh Hari Tanoe. Hari Tanoe sebagai pemilik media diduga menggunakan haknya untuk mengontrol proses pembuatan dan distribusi berita di medianya. Altschull dalam McQuail (2010: 226) menyebutkan '*second law of journalism*,' yaitu konten dari media selalu mencerminkan kepentingan siapa pun yang membiayainya. Hari Tanoe yang juga menjadi cawapres dari Partai Hanura mendukung Wiranto sebagai capresnya dan

²<http://skalanews.com/berita/detail/173546/Jokowi-Diprediksi-akan-Terus-Digempur-Kampanye-Negatif>

³Triyono, Agus. *PRODUKSI TEKS DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK MEDIA*. KomuniTi, Vol. VI No.1 (Januari 2012)

menggunakan *negative campaign* untuk menyerang saingan mereka, yaitu Jokowi. Oleh karena itu, terjadi konglomerasi media oleh Hari Tanoe dalam mendukung diri dan partainya dan menyerang Jokowi dari partai PDIP sebagai saingannya.

Akibatnya berita yang diberitakan oleh sindonews cenderung bias dan realitas yang dipresentasikan tidak objektif. Berita terkadang tidak merepresentasikan realitas yang objektif (Nabi dan Oliver, 2009: 114). Padahal seharusnya sebagai ranah publik, media memberikan pemberitaan yang seimbang dan tidak bias. Sebisa mungkin, kualitas informasi seharusnya berimbang dan adil (tidak berpihak) (McQuail, 2010: 202).⁴

B. Rumusan Masalah

Sindonews.com yang dikuasai oleh partai tertentu menjadi bias dalam pemberitaan yang ditulisnya. Jokowi yang dianggap sebagai saingan dalam bursa calon presiden dan wakil presiden mendapat *negative campaign* dari sindonews.com. Oleh karena itu, dapat dirumuskan permasalahan, bagaimana Jokowi direpresentasikan dalam pemberitaan yang dimuat dalam situs berita online sindonews.com? Bagaimana praktek discourse dan sosiokultural sindonews.com?

TINJAUAN TEORI

A. Ekonomi Politik Golding dan Murdock

Media yang dianggap menjadi bagian dalam sistem ekonomi dan politik perlu ditinjau dengan teori ekonomi politik. Triyono (2012: 18-19) menyebutkan Golding dan Murdock menyatakan studi ekonomi politik liberal menekankan pada proses dan dampak dari liberalisasi pasar; dan ekonomi politik kritis yang menekankan pada pengorganisasian kepemilikan dan produksi industri budaya. Dalam perpektif instrumental, yang menjadi fokus utama adalah bagaimana cara para pemilik modal menggunakan kekuasaan ekonomi mereka dalam sebuah sistem pasar komersial untuk menjamin aliran informasi publik yang sejalan dengan misi dan tujuan mereka.

Triyono (2012: 22) menyebutkan bahwa pertanyaan penting bagi kajian ekonomi politik adalah melakukan kajian bagaimana kekuasaan yang ada melakukan kendali atas produksi budaya (teks) dan distribusinya baik membatasi atau menyebar luaskan pada ranah public sphere. Dalam perspektif Habermas, ruang publik didefinisikan sebagai ruang di mana setiap individu dapat masuk dan turut serta dalam percakapan tanpa tekanan dari pihak lain. Dalam prakteknya, muncul dua isu kunci. Pertama, pola kepemilikan dari beberapa institusi dan konsekuensi dari pola tersebut untuk mengendalikan aktivitas mereka. Kedua, hubungan alamiah antara regulasi negara dengan institusi komunikasi (Golding dan Murdock dalam Curran and Gurevitch, 1991: 15 -30). Keadaan ini bisa menciptakan konglomerasi

⁴McQuaill, Denis. (2010) *McQuail's Mass Communication Theory*. London: SAGE Publication Ltd.

komunikasi (media) yang merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Sistem kepemilikan media publik saat ini telah mengalami perubahan dengan adanya kebijakan privatisasi, di mana sektor-sektor publik jual kepada pihak swasta.

Dalam pembuatan berita ada 5 faktor yang mempengaruhi: (1) ideologi, (2) ekstra media, (3) organisasional, (4) rutinitas media, dan (5) faktor individual yaitu pekerja media. Masing-masing faktor ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Faktor individual pekerja media berpengaruh dalam melakukan konstruksi realitas. Faktor rutinitas media berkaitan dengan keseharian dari mekanisme pembentukan berita. Faktor organisasi media meliputi komponen-komponen yang ada dalam kelembagaan organisasi tersebut, struktur organisasi, hingga sistem keorganisasian yang diterapkan. Faktor ekstra media merupakan faktor yang berasal dari luar lingkungan media yang juga mempengaruhi proses pembuatan berita. Yang terakhir, faktor ideologi merupakan kerangka referensi dalam setiap individu dalam melihat suatu realitas dan bagaimana individu tersebut menyikapi realitas tersebut. Melalui faktor-faktor tersebut maka proses pembentukan berita yang negatif terhadap Jokowi akan dapat dijelaskan.

METODE PENELITIAN

A. Paradigma

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan mengacu pada paradigma penelitian analisis wacana kritis. Model analisis Fairclough digunakan dalam analisis penelitian ini karena titik perhatiannya adalah melihat bahasa sebagai praktik kekuasaan (Eriyanto, 2001: 287).⁵ Oleh karena itu, fokus dari analisis penelitian adalah bagaimana bahasa terbentuk dan dibentuk dari relasi sosial dan konteks sosial tertentu.

B. Metode Penelitian

Model yang dibangun oleh Fairclough ini mengintegrasikan secara bersama-sama analisis wacana berdasarkan pada linguistik dan pemikiran sosial dan politik, dan secara umum diintegrasikan pada perubahan sosial. Ada tiga dimensi dalam model analisis wacana Fairclough: teks, *discourse practice*, dan *sociocultural practice*. Teks dianalisis secara linguistik, dengan melihat kosa kata, semantik, dan tata kalimat yang digabung sehingga membentuk pengertian. *Discourse practice* merupakan dimensi yang berhubungan dengan proses produksi dan konsumsi teks yang meliputi pola kerja, bagan kerja, dan rutinitas dalam menghasilkan berita. *Sociocultural practice* merupakan dimensi yang berhubungan dengan konteks di luar teks, seperti konteks situasi dan secara lebih luas konteks praktik institusi dari

⁵Eriyanto. (2001) *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS

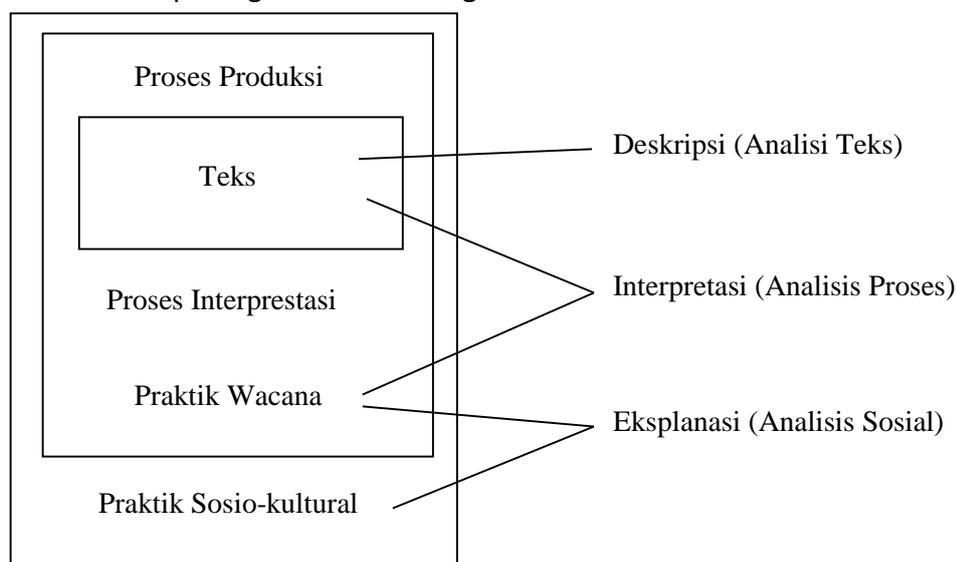
media dalam hubungannya dengan masyarakat atau budaya dan politik tertentu. Proses pengumpulan data tersebut dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Level Masalah	Level Analisis	Metode Pengumpulan Data
1	Praktik Sosiokultural	Makro	Secondary data Penelusuran literatur
2	Praktik Wacana	Meso	Secondary data
3	Teks	Mikro	Analisis wacana sosial

Metode yang digunakan adalah analisis wacana sintagmatis dan paradigmatis.⁶ Analisis wacana sintagmatis menganalisis wacana dengan metode kebahasaan (*syntactic approach*) di mana peneliti mengeksplorasi kalimat demi kalimat untuk menarik kesimpulan. Sedangkan analisis wacana paradigmatis menganalisis wacana dengan memperhatikan tanda-tanda (*sign*) tertentu dalam sebuah wacana untuk menemukan makna keseluruhan. Bentuk analisis dalam penelitian ini memakai metode analisis wacana sosial karena menggunakan analisis wacana kritis Fairclough. Level analisis dari penelitian ini menganalisis wacana pada level teks/naskah beserta konteks dan historisnya (*analisis multilevel*). Objek penelitian ini atau bentuk dari berita yang diteliti berbentuk artikel dalam situs berita online. Ada 4 artikel yang akan diteliti, yaitu artikel dengan judul: (1) *Nyapres, Jokowi tak cukup modal populer*, (2) *Jokowi nyapres, pembangunan Jakarta berpotensi terhambat*, (3) *Jokowi dinilai tak bertanggung jawab*, dan (4) *HMI: Jokowi tak amanah dan berkhianat*.

C. Kerangka Analisis

Analisis teks/naskah bertujuan untuk mengungkapkan makna dan dapat dilakukan dengan cara menganalisis bahasa secara kritis. Tahap dari analisis meliputi tahap deskripsi dan tahap eksplanasi. Proses tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



⁶ Hamad, Ibnu. *Lebih Dekat dengan Analisis Wacana*. Jurnal MediaTor, Vol. 8 No. 2 (Desember 2007)

Tahap deskripsi adalah tahap menguraikan isi dan analisis secara deskriptif atas teks dan tidak dihubungkan dengan aspek lain (Eriyanto, 2001: 327). Berikutnya adalah tahap eksplanasi. Tahap ini bertujuan untuk menghubungkan deskripsi yang dijabarkan dengan praktik sosiokultural di mana media berada melalui studi pustaka.

D. ANALISIS

A. Analisis Teks

Analisis teks situs berita online sindonews.com dilakukan dengan analisis framing yang merujuk pada konsep Gamson dan Modigliani. Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap 4 artikel ditemukan 4 frame atau bingkai yang merupakan gagasan sentral.

Teks 1

Judul : **Nyapres, Jokowi tak cukup modal populer**

Tanggal : 14 Maret 2014

Penulis : Haris Kurniawan

Frame : Capres dengan modal kepopuleran

I. Frame Devices

Metaphors : Perombakan sistem, nilai moral ambruk. Bisa enggak Pak Jokowi melakukan ini?
Hanya impor 1.000 busway saja tidak beres.

Catchphrases : bermodalkan ketenaran

Exemplars : Jokowi harus mengakui belajar banyak untuk menjawab tantangan Indonesia, tidak cukup populer.

Depiction : mandat

nekat

bermodalkan

populer

Visual Images :



Gambar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berdiri di dekat Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di mana Jokowi agak membungkuk seperti sedang memberi hormat.

II. Reasoning Devices

Roots : Kepopuleran Jokowi tidak menjamin kemampuan untuk memimpin sebuah negara.

Appeals to Principle : Kepopuleran Jokowi diperoleh karena prestasinya sebagai walikota dan perubahan-perubahan yang dilakukan ketika menjabat sebagai Gubernur Jakarta.

Consequences : Pengalaman Jokowi sebagai Walikota dan Gubernur belum tentu membantu Jokowi dalam mengatasi masalah di Indonesia jika dia terpilih sebagai presiden.

Pada berita berjudul "*Nyapres, Jokowi Tak Cukup Modal Populer*",⁷ berita ini menunjukkan nada yang negatif dan memberikan sindiran terhadap Jokowi yang populer karena pemberitaannya di media-media massa. Kepopulerannya tidak bisa menjadi tolok ukur kelayakan beliau untuk mencalonkan diri sebagai presiden Indonesia dalam pemilu 2014. Selain kepopuleran, mungkin Jokowi perlu menunjukkan keberhasilannya dalam membenahi Jakarta terlebih dahulu, sehingga kepantasannya dalam bursa capres dapat diperhitungkan.

Teks 2

Judul : **Jokowi nyapres, pembangunan Jakarta berpotensi terhambat**

Tanggal : 15 Maret 2014

Penulis : Adam Prawira

Frame : Dampak pencapresan pada pembangunan Jakarta

I. Frame Devices

Metaphors : Jokowi (cuti) nyapres, Ahok jadi jurkam, sekdanya juga belum ada. Bagaimana ini?

Banyak warga DKI Jakarta yang tidak setuju jika Jokowi maju menjadi capres

Catchphrases : -

Exemplars : Program yang telah direncanakan oleh seorang gubernur mungkin tidak terlaksana jika ada penggantian gubernur yang baru

Kondisi kekosongan kepemimpinan di Jakarta akan semakin terasa saat masa kampanye pemilu nanti.

Dari survei internal PKS yang dilakukan pada Januari lalu, sebanyak 67% (responden) tidak setuju Jokowi maju capres.

⁷<http://pemilu.sindonews.com/read/2014/03/14/113/844419/nyapres-jokowi-tak-cukup-modal-populer>

Depiction : pengerukan sungai
sengketa tanah
musibah banjir
ruang terbuka hijau

Visual Images :



Gambar banjir di Jakarta di mana ada beberapa kendaraan yang menerjang banjir baik di jalur bus way maupun di jalan umum.

II. Reasoning Devices

Roots : Keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengukung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden dinilai berpotensi menghambat laju pembangunan Jakarta.

Potensi itu muncul karena tidak sedikit proyek pembangunan di Jakarta yang belum selesai dan belum stabilnya birokrasi di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

Appeals to Principle : Pembangunan Jakarta tidak hanya dipengaruhi oleh keputusan pencapresan Jokowi tetapi juga peran serta masyarakat Jakarta untuk mensukseskan pembangunan

Consequences : Masyarakat Jakarta tidak akan mendukung pencapresan Jokowi karena jika Jokowi menjadi presiden maka pembangunan Jakarta tidak akan terwujud

Pada berita "*Jokowi Nyapres, Pembangunan Jakarta Berpotensi Terhambat*",⁸ artikel ini memberikan nada yang negatif terhadap Jokowi karena keputusan yang diambil Jokowi untuk ikut dalam bursa capres 2014 akan berdampak pada pembangunan di Jakarta. Pembangunan yang dilaksanakan pada masa pemerintahan Jokowi sebagai gubernur DKI Jakarta akan terhambat apabila beliau sibuk dengan berkampanye maupun apabila beliau terpilih menjadi presiden Republik Indonesia. Hal ini akan menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. Di dalam artikel ini, anggota Komisi D DPRD

⁸<http://nasional.sindonews.com/read/2014/03/15/13/844483/jokowi-nyapres-pembangunan-jakarta-berpotensi-terhambat>

DKI Jakarta, Tubagus Arif, menyebutkan faktor-faktor yang menghambat laju pembangunan Jakarta. Di antaranya adalah masih banyak proyek pembangunan di Jakarta yang belum selesai dan kestabilan sistem birokrasi di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta belum tercapai. Tubagus juga menambahkan bahwa akan ada kekosongan kepemimpinan saat kampanye pemilu. Dikutip dari artikel, beliau mengatakan, *“Jokowi (cuti) nyapres, Ahok jadi jurkam, sekiranya juga belum ada. Bagaimana ini.”*

Teks 3

Judul : **Jokowi dinilai tak bertanggung jawab**

Tanggal : 16 Maret 2014

Penulis : Mihardi

Frame : Gubernur yang tidak bertanggung jawab

I. Frame Devices

Metaphors : seharusnya dia (Jokowi) menepati janjinya dahulu. Kalau begini, dia (Jokowi) tidak bertanggung jawab kepada warga Jakarta (yang sudah memilihnya pada Pilgub 2012).

Catchphrases : -

Exemplars : Banyak janji Jokowi yang belum bisa ditepati. Di antaranya masalah banjir dan macet yang kerap kali terjadi di Ibu Kota Jakarta.

Dia meninggalkan jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Depiction : Tim Advokasi

hak sebagai warga negara
menggugat

Visual Images :



Gambar Jokowi berdiri dikelilingi oleh para wartawan yang sedang meliput Jokowi

II. Reasoning Devices

- Roots : Tim Advokasi Jakarta Baru merasa kecewa dengan pencapresan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Karena mereka menilai, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu tidak bisa menepati janjinya sebagai gubernur
- Appeals to Principle : Gubernur yang memiliki janji-janji ketika kampanye pilgub harus mewujudkannya ketika menjabat sebagai gubernur
- Consequences : Masyarakat tidak akan memilih Jokowi sebagai presiden karena dia tidak bertanggung jawab dengan meninggalkan tugasnya sebagai gubernur

Berita berjudul *“Jokowi dinilai tak bertanggung jawab,”*⁹ bernada negatif karena menilai Jokowi adalah seseorang tidak bertanggung jawab. Hal ini disebabkan pencalonan dirinya sebagai capres dalam pemilu 2014 yang tidak tepat karena beliau masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta dan belum berakhir masa kerjanya. Oleh karena itu, apabila beliau kemudian terpilih menjadi presiden Republik Indonesia, maka beliau harus menanggalkan jabatannya sebagai gubernur dan meninggalkan program-program kerjanya yang belum selesai dan ini merupakan hal yang tidak bertanggung jawab. Koordinator Tim Advokasi Jakarta Baru, Habiburrahman, mengungkapkan bahwa Jokowi tidak bertanggung jawab pada masyarakat Indonesia dengan mengatakan berdasarkan artikel pemberitaan ini, *“Yah seharusnya dia (Jokowi) menepati janjinya dahulu. Kalau begini, dia (Jokowi) tidak bertanggung jawab kepada warga Jakarta (yang sudah memilihnya pada Pilgub 2012).*

Teks 4

Judul : **HMI: Jokowi tak amanah dan berkhianat**

Tanggal : 18 Maret 2014

Penulis : Slamet Riadi

Frame : Pemimpin yang tidak amanah dan berkhianat

I. Frame Devices

Metaphors : -

Catchphrases : protes pedas

Exemplars : Pencapresan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terus menuai protes pedas dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta Raya.

HMI melakukan aksi demonstrasi mendesak Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) agar serius mengungkap dugaan korupsi pada pengadaan bus Transjakarta.

Depiction : mandat

⁹<http://pemilu.sindonews.com/read/2014/03/16/113/844710/jokowi-dinilai-tak-bertanggung-jawab>

kedudukan
tidak amanah
berkhianat

Visual Images :



Gambar HMI membawa replika Bus TransJakarta melakukan aksi damai di depan Gedung KPK, Jakarta Selatan.

II. Reasoning Devices

Roots : kalau Jokowi menerima mandat atasannya di partai tersebut, maka mantan Wali Kota Solo itu merupakan pemimpin yang tidak bisa dipercaya. Karena, lebih memilih kedudukan daripada kepercayaan masyarakat

Appeals to Principle : Jabatan sebagai gubernur adalah sebuah amanah dari masyarakat dan janji-janji ketika kampanye harus ditepati setelah menjabat sebagai gubernur

Consequences : Masyarakat tidak akan mendukung Jokowi karena merupakan seorang pemimpin yang tidak memegang amanah dan berkhianat pada masyarakat

Artikel dengan judul "*HMI: Jokowi Tak Amanah dan Berkhianat*"¹⁰ menunjukkan nada yang negatif karena Jokowi dinilai tidak bertanggung jawab karena tidak memegang amanah dan telah berkhianat dengan pengajuan dirinya dalam bursa capres 2014. Jokowi mendapatkan kritikan dari HMI yang ternyata tidak terima jika Jokowi penyalonkan dirinya. Diberitakan bahwa banyak pihak yang memprotes pencalonan Jokowi sebagai capres. Salah satu pihak tersebut adalah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta Raya. Dalam orasinya, koordinator aksi, Raden Hidayatullah, dalam artikel ini mengatakan dengan tegas, "Usir Gubernur Jakarta Jokowi yang tidak amanah dan berkhianat kepada warga Jakarta dari Balai Kota."

B. Analisis Praktek Wacana

1. Analisis Produksi Teks

a. Sejarah Berdirinya Situs Berita Online sindonews.com

¹⁰<http://pemilu.sindonews.com/read/2014/03/18/113/845362/hmi-jokowi-tak-amanah-dan-berkhianat>

Sindonews.com merupakan situs berita online yang secara resmi berdiri pada 4 Juli 2012, di bawah manajemen yang sama dengan Koran Sindo, yakni PT. Media Nusantara Informasi (MNC Group). Hampir serupa dengan Koran Sindo, sindonews.com memiliki tagline "Sumber Informasi Terpercaya".¹¹ Sindonews bukan merupakan situs berita dari Koran Sindo, namun sebagai situs pendukung untuk kebesaran Koran Sindo. Sindonews memiliki awak redaksi yang mampu memproduksi berita sendiri, tanpa tergantung dari Koran Sindo. Namun begitu, sindonews tetap melakukan sinergi pemberitaan dengan semua media di MNC Group, yakni Koran Sindo, Sindo TV, Sindo Trijaya FM, Sindo Weekly, Okezone.com, MNC TV, RCTI, Global TV, dan MNC Channel.

Pada dasarnya sindonews menyajikan berita dan memiliki konten yang selaras dengan Koran Sindo. Namun, berita yang dikemas dalam portal berita ini lebih mengarah kepada pembaca yang ingin membaca berita secara cepat, akurat, dan efisien dalam hal waktu. Berita dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi lebih pendek dan lebih mudah dinikmati para pembaca di internet. Selebihnya, portal berita ini selalu menyarankan jika ingin mendapatkan informasi detail pemberitaannya, pembaca disarankan untuk mengikuti juga di Koran Sindo terkait dengan berita di portal online ini.

SINDOnews lahir dengan dibidani oleh Okezone.com. Namun karena kesamaan brand SINDO yang dipakainya, SINDOnews diambil alih oleh manajemen Koran Sindo. Sebelumnya SINDOnews memiliki karakter pemberitaan yang indepth, dan tidak running/breaking news. Namun setelah diambil alih oleh Koran Sindo, SINDOnews mengubah karakternya serupa dengan media-media online yang telah ada.¹²

b. Isi Situs Berita Online sindonews.com

Focus of Interest dari sindonews.com meliputi beberapa kategori pemberitaan seperti informasi seputar Nasional, Metronews, Daerah, Ekonomi dan Bisnis, International, Sports, Soccer, dan Autotekno. SINDOnews juga menyajikan informasi berbentuk multimedia seperti Sindo Photo, Sindo Video, dan Live TV MNC Media.

c. Jajaran Direksi¹³ dan Tim Redaksi¹⁴

Sindonews.com berada di bawah manajemen PT. Media Nusantara Informasi (MNC Group) maka Hary Tanoesoedibjo merupakan CEO utama dari managerial sindonews.com. Sedangkan jajaran direksi sindonews.com, dipimpin oleh Sururi Alfaruq sebagai Direktur Utama (CEO), Rudy Hidayat sebagai Direktur Keuangan (CFO), dan Lia Marlina sebagai VP Sales & Marketing Communication.

¹¹ <http://www.sindonews.com/about>

¹² <http://id.wikipedia.org/wiki/SINDOnews.com>

¹³ <http://www.sindonews.com/about>

¹⁴ <http://www.sindonews.com/redaksi>

Sementara itu, jajaran tim redaksi dipimpin oleh Pung Purwanto dan Masirom sebagai Wakil Pemimpin Redaksi. Redaktur terdiri dari 5 personel: Andryanto Wisnuwidodo, Dani Mohammad Dahwilani, Esnoe Faqih Wardhana, Hariyanto Kurniawan dan Hermanto. Di bagian Sekretaris dan Administrasi Redaksi ada Henny Wulandari dan Imanda Julia Naomi. Selain itu ada 16 reporter dan keempat penulis berita yang artikelnya menjadi sampel penelitian ini (Haris Kurniawan, Adam Prawira, Mihardi, dan Slamet Riadi) termasuk di dalamnya. Terdapat 3 fotografer yaitu, Arie Yudhistira, Astra Bonardo, dan Ratman Suratman.

d. Proses Kerja Reporter di News Department Situs Berita Online sindonews.com

Berikut ini adalah proses kerja reporter di *News Departement* yang dibagi menjadi 3 tahap: pra liputan, liputan, dan pasca liputan.

1. Pra liputan

- a. Sebelum penulis bertugas di lapangan meliput berita, penulis harus mengetahui dan memahami materi liputan yang di berikan oleh koordintor liputan.
- b. Berkoordinasi dengan koordinator liputan mengenai materi yang akan diliput.
- c. Apabila penulis ingin mewawancarai narasumber hendaknya membuat janji terlebih dahulu sehingga tidak mengganggu aktifitas nara sumber yang akan diwawancarai.
- d. Penulis harus menyiapkan pertanyaan – pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber.
- e. Penulis terlebih dahulu harus mengecek peralatan yang dibutuhkan untuk liputan (kamera, handrecorder, handphone, baterai) dalam kondisi prima, sehingga meminimalisir kendala teknis di lapangan.

2. Liputan

Sebagai seorang reporter, penulis harus mampu mencari data-data kongkrit di lapangan dengan metode 5 W + 1 H (What, Who, Where, When, Why+How). Semakin lengkap data-data tersebut di peroleh, semakin baik pula isi berita yang akan dibuat.

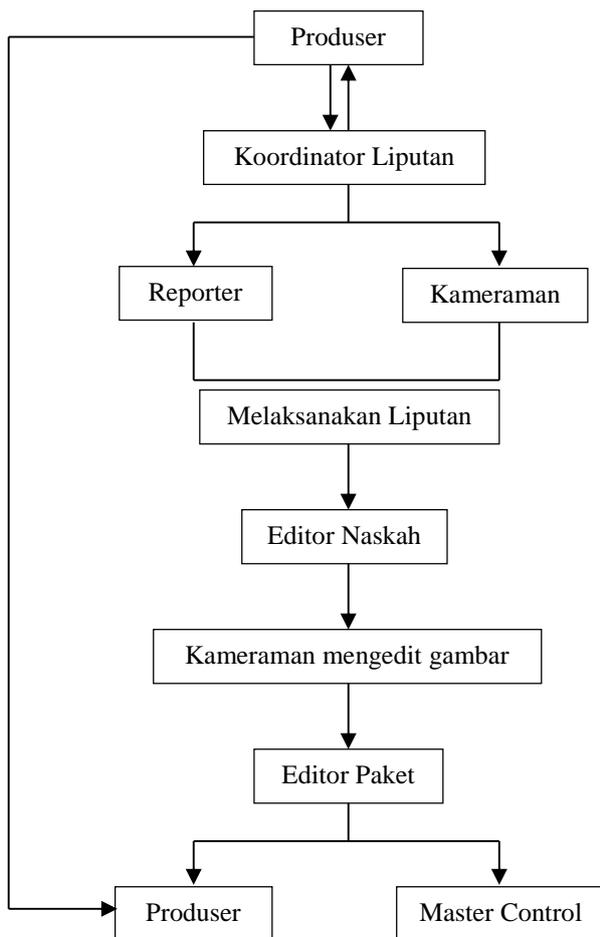
- a. Layaknya Sebagai seorang reporter, penulis harus cepat tanggap terhadap isu – isu yang beredar.
- b. Ketika wawancara dilakukan penulis harus mampu mencari dan menggali data-data dari narasumber yang berkompeten.
- c. Apabila terjadi sebuah peristiwa atau kejadian penting di lapangan yang dirasa penting untuk diberitakan tanpa sepengetahuan koordinator liputan, maka penulis sebagai seorang reporter harus berinisiatif meliput kejadian tersebut, untuk itu seorang reporter dituntut harus mempunyai *sense of news* yang tinggi.
- d. Apabila koordinator liputan menginstruksikan penulis melakukan laporan langsung dari tempat kejadian maka penulis harus mampu membuat naskah tersebut dengan cepat dan tepat.

- e. Alat komunikasi seperti telepon genggam amat di perlukan penulis ketika liputan guna berkoordinasi dengan koordinator liputan sekaligus untuk membuat berita menggunakan handphone jika koordinator sedang sibuk atau tidak bisa dihubungi.
- f. Setelah selesai meliput, penulis langsung bergegas menuju kantor redaksi untuk membuat naskah berita.

3. Pasca Liputan.

- a. Setelah tiba di kantor, penulis membuat alur berita berdasar data informasi yang sudah diperoleh.
- b. Setelah itu penulis langsung membuat naskah berita dengan mengacu pada kaidah-kaidah jurnalistik, sehingga penulis dituntut menguasai hal tersebut.
- c. Usai membuat naskah penulis memberikannya kepada produser untuk dikoreksi.
- d. Naskah yang telah di koreksi kemudian diedit oleh penulis sendiri.
- e. Usai editor dan penulis berkoordinasi untuk menentukan shotshot gambar yang di butuhkan, sehingga terjadi sinkronisasi dengan naskah berita yang di buat.

Secara ringkas proses produksi artikel sindonews.com dapat digambarkan sebagai berikut:



2. Analisis Konsumsi Teks

Khalayak sasaran sindonews.com adalah seluruh publik Indonesia dan dunia karena Internet dapat diakses oleh siapapun dan dimana pun. Untuk mengetahui segala artikel pemberitaan, cukup hanya menuliskan alamat situs sindonews.com. Selain itu, saat ini telah tersedia aplikasi android sindonews.com untuk semakin memudahkan para pembaca untuk mengakses berita-berita terkini.

3. Analisis Praktek Sosiokultural

Studi ekonomi politik kritis terdapat ranah instrumentalis. Fokus utamanya adalah bagaimana cara para pemilik modal menggunakan kekuasaan ekonomi mereka dalam sebuah sistem pasar komersial untuk menjamin aliran informasi publik yang sejalan dengan misi dan tujuan mereka. Dengan kata lain, bagaimana kekuasaan yang ada melakukan kendali atas produksi budaya (teks) dan distribusinya baik membatasi atau menyebar luaskan pada ranah public sphere.

Ada dua isu kunci. Pertama, pola kepemilikan dari beberapa institusi dan konsekuensi dari pola tersebut untuk mengendalikan aktivitas mereka. Sindonews.com berada di bawah manajemen PT. Media Nusantara Informasi (MNC Group) di mana Hary Tanoesoedibjo merupakan CEO utama dari managerial sindonews.com. Hary Tanoe yang merupakan saingan politik Jokowi mengendalikan aktivitas media yang dimilikinya dan menentukan focus of interest media. Dengan adanya rapat di jajaran direksi termasuk Direktur Utama sindonews.com, Hary Tanoe dapat mengkoordinasikan segala bentuk pemberitaan yang dapat mendukung kegiatan politiknya. Selanjutnya Direktur Utama melakukan koordinasi dengan jajaran tim redaksi, redaktur dan para reporter serta para fotografer.

Kedua, hubungan alamiah antara regulasi negara dengan institusi komunikasi. Keadaan ini bisa menciptakan konglomerasi komunikasi (media) yang merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Sistem kepemilikan media publik saat ini telah mengalami perubahan dengan adanya kebijakan privatisasi, di mana sektor-sektor publik jual kepada pihak swasta. Dalam hal ini, Hary Tanoe sebagai konglomerat menguasai beberapa stasiun televisi, surat kabar, radio, dan situs berita online. Sektor-sektor publik tersebut banyak dikuasai oleh MNC Group yang mana kepemilikannya berada di tangan Hary Tanoe sehingga terjadi privatisasi.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Sindonews.com memuat berita yang fokus of interest-nya berusaha memenangkan dan menguntungkan pihak Hary Tanoe yang diusung oleh Partai Hanura.
2. Dikaitkan dengan teori konglomerasi dan privatisasi, aktivitas pemberitaan sindonews.com yang merupakan bagian dari MNC Group dipengaruhi oleh kekuasaan pemilik media dan para elit menguasai sektor-sektor publik yang mengakibatkan adanya privatisasi.

3. Dari level teks, diperoleh 4 frame yang dibawa oleh sindonews.com terkait pencapresan Jokowi yang diusung oleh PDIP. 4 frame tersebut adalah capres dengan modal kepopuleran, dampak pencapresan pada pembangunan Jakarta, Gubernur yang tidak bertanggung jawab, dan pemimpin yang tidak amanah dan berkhianat.
4. Dari level *discourse practice* terlihat bahwa pemilik media memegang kendali terhadap bingkai pemberitaan dan menentukan tujuan untuk melawan lawan politik dari pemilik media sehingga terlihat dari pemberitaan, posisi sindonews.com adalah kontra-Jokowi.
5. Dari level praktek sosial budaya (*sociocultural practice*) terlihat bahwa teks dipengaruhi keadaan politik di mana pada tahun 2014 ini terdapat pemilihan umum dan para pemilik media menggunakan kekuasaan mereka untuk menentukan bingkai berita dan posisi dukungannya terhadap tokoh tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Eriyanto. (2001). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKIS
- Gumilang, Lanang Febria Galing. (2010). *Proses Kerja Reporter Berita Detikhot Subkanal Music di Detik.Com*. Laporan Kuliah Kerja Media 2009. Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret.
- Golding, Peter dan Graham Murdock. *Culture, Communications and Political Economy* dalam James Curran dan Michael Gurevitch. 1991. *Mass Media and Society*. London: Edward Arnold.
- McQuaill, Denis. (2010). *McQuail's Mass Communication Theory*. London: SAGE Publication Ltd.
- Nabi, Robin L dan Mary Beth Oliver. (2009). *The SAGE Handbook of Media Processes and Effect*. California: SAGE Publications, Inc.

Jurnal Ilmiah

- Hamad, Ibnu. (Desember 2007). *Lebih Dekat dengan Analisis Wacana*. Jurnal MediaTor, Vol. 8 No. 2
- Triyono, Agus. (Januari 2012). *PRODUKSI TEKS DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK MEDIA*. KomuniTi, Vol. VI No.1

Artikel Surat Kabar dari Internet

- Afrianda, Risman. (2014, 10 April). Jokowi Diprediksi akan Terus Digempur Kampanye Negatif. Diakses pada 19 Maret 2014, dari <http://skalanews.com/berita/detail/173546/Jokowi-Diprediksi-akan-Terus-Digempur-Kampanye-Negatif>
- Kurniawan, Haris. (2014, 14 Maret). Nyapres, Jokowi Tak Cukup Modal Populer. Diakses pada 19 Maret 2014, dari <http://pemilu.sindonews.com/read/2014/03/14/113/844419/nyapres-jokowi-tak-cukup-modal-populer>

Mihardi. (2014, 16 Maret). Jokowi Dinilai Tak Bertanggung Jawab. Diakses pada 19 Maret 2014, dari <http://pemilu.sindonews.com/read/2014/03/16/113/844710/jokowi-dinilai-tak-bertanggung-jawab>

Prawira, Adam. (2014, 15 Maret). Jokowi Nyapres, Pembangunan Jakarta Berpotensi Terhambat. Diakses pada 19 Maret 2014, dari <http://pemilu.sindonews.com/read/2014/03/18/113/845362/hmi-jokowi-tak-amanah-dan-berkhianat>

Riadi, Slamet. (2014, 18 Maret). HMI: Jokowi Tak Amanah dan Berkhianat. Diakses pada 19 Maret 2014, dari <http://pemilu.sindonews.com/read/2014/03/18/113/845362/hmi-jokowi-tak-amanah-dan-berkhianat>